

**IMPLIKASI HUKUM KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF SISTEM TATA NEGARA**

Untuk memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Progam Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh
ACHMAD ARIF ALVIANTO
201910110311466

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLIKASI HUKUM KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN OTORITA IBU
KOTA NUSANTARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SISTEM TATA
NEGARA**

Diajukan Oleh:

ACHMAD ARIF ALVIANTO

201910110311466

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,


Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Dekan,


Prof. H. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholideh, SH., MH



LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

ACHMAD ARIF ALVIANTO

201910110311466

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 21 Oktober 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surya Anoraga, SH, M.Hum
Sekretaris : Fitria Esfandiani, SH, M.H.
Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH, M.Si, M.Hum
Penguji II : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH, M.H.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ACHMAD ARIF ALVIANTO

NIM : 201910110311466

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**IMPLIKASI HUKUM KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN OTORITA IBU
KOTA NUSANTARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SISTEM TATA
NEGARA**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 04 Nopember 2025


Achmad Arif Alvianto

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

My anxiety is loud, but my ambition is louder.

Duniaku mungkin berantakan, tapi impianku lebih besar.



Abstrak

Nama : Achmad Arif Alvianto

Nim : 201910110311466

Judul : IMPLIKASI HUKUM KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SISTEM TATA NEGARA

Pembimbing : 1. Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

2. Fitria Esfandiari, SH., MH

Penelitian ini menganalisis kedudukan dan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan fokus pada kesesuaiannya dengan prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang IKN. Hasil analisis menunjukkan bahwa model pemerintahan Otorita IKN merupakan sebuah anomali konstitusional. Status hukumnya yang hibrida—sebagai Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) namun berfungsi sebagai lembaga setingkat kementerian menciptakan ambiguitas hukum yang signifikan. Landasan hukum yang digunakan, yaitu Pasal 18B UUD 1945, dinilai sebagai "jalan pintas konstitusional" untuk menghindari kewajiban demokrasi yang diatur dalam Pasal 18. Model ini secara fundamental mencederai prinsip kedaulatan rakyat melalui dua mekanisme utama: pertama, penunjukan Kepala Otorita secara langsung oleh Presiden, yang meniadakan pemilihan umum daerah (Pilkada); dan kedua, ketiadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mengamputasi fungsi vital legislasi, anggaran, dan pengawasan lokal. Akibatnya, terjadi defisit demokrasi yang serius, di mana kekuasaan terpusat pada eksekutif yang tidak akuntabel kepada rakyat setempat, sehingga menciptakan risiko "enklave otoritarian" demi efisiensi proyek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model Otorita IKN tidak selaras dengan jiwa desentralisasi dan demokrasi yang menjadi pilar reformasi, serta berpotensi menjadi preseden berbahaya bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Kata Kunci : Otorita, Ibu Kota Nusantara, Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, Desentralisasi, Kedudukan dan kewenangan otorita.

Abstract

Nama : Achmad Arif Alvianto

Nim : 201910110311466

Judul : **IMPLIKASI HUKUM KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SISTEM TATA NEGARA**

Pembimbing : **1. Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum**

2. Fitria Esfandiari, SH., MH

This study analyzes the position and authority of the Nusantara Capital City (IKN) Authority within the Indonesian constitutional system, with a focus on its alignment with the principle of people's sovereignty under the 1945 Constitution. Employing a normative juridical research method with conceptual and statutory approaches, this study examines Law No. 3 of 2022 concerning the IKN. The analysis indicates that the IKN Authority's governance model constitutes a constitutional anomaly. Its hybrid legal status as a Special Regional Government (Pemdassus) while functioning as a ministry-level institution creates significant legal ambiguity. The legal basis utilized, Article 18B of the 1945 Constitution, is deemed a "constitutional shortcut" to circumvent the democratic obligations stipulated in Article 18. This model fundamentally undermines the principle of people's sovereignty through two primary mechanisms: first, the direct appointment of the Head of the Authority by the President, which nullifies regional head elections (Pilkada); and second, the absence of a Regional People's Representative Council (DPRD), which amputates the vital functions of local legislation, budgeting, and oversight. Consequently, a serious democratic deficit arises, wherein power is centralized in an executive that is not accountable to the local populace, thereby creating the risk of an "authoritarian enclave" for the sake of project efficiency. This study concludes that the IKN Authority model is incongruent with the spirit of decentralization and democracy, which are pillars of the reform era, and potentially sets a dangerous precedent for governance in Indonesia.

Keywords: Authority, Nusantara Capital City, People's Sovereignty, Democracy, Decentralization, Position and Authority of the Authority.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karuniaNya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLIKASI HUKUM KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SISTEM TATA NEGARA” skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Ibu Anik (Mama) dan Bapak Nurngali (Ayah) yang selalu mencintai dan sudah menjadi sosok yang kuat serta selalu menginspirasi penulis. Terimakasih karena tidak pernah bosan dan letih untuk memberikan dukungan baik secara imateril maupun materil terhadap Penulis. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Deddy Candra Alvianto (kakak) Della Ayu Maulida (adik) yang telah mendukung penulis tanpa kenal lelah.;
2. Bapak Prof Dr. H. Nazaruddin Malik, SE. M.SI, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Prof, Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum (Wakil Dekan I), Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H (Wakil Dekan II), Said Noor Prasetyo, S.H., M.H (Wakil Dekan III) dan Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum;
4. Bapak Dr Surya Anoraga, S.H., M.H dan Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H.. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis. Penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalmnya karena telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Serta mengajarkan penulis arti bersabar dalam hal menunggu dan sadar tidak semua yang diinginkan langsung tercapai karena semua butuh proses;

5. Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H selaku dosen wali penulis di Kelas J angkatan 2019 selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak mendukung selama penulis menimba ilmu;
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kiranya telah banyak memberikan pengetahuan pada Penulis selama di Fakultas Hukum
7. Teman-teman Penulis yang telah banyak memberikan warna selama perkuliahan penulis yaitu Berlian Puspita Wibowo, Teguh Bahrudin Yusuf, Muhamad Rafli, Dimas Ageng Galimukti, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan untuk segala waktu dan dukungannya, semoga pertemanan kita terus terjaga walau nantinya terbatas oleh jarak;
8. Seluruh teman-teman awal perkuliahan pada Kelas J Penulis, semoga kita tetap menjadi keluarga, dan semoga hubungan persaudaraan dan pertemanan kita terus terjaga. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Segala bentuk kritik dan saran akan penulis terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa yang akan datang karena penulis sangat menyadari bahwasanya baik penulis maupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 3 Oktober 2025

Achmad Arif Alvianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian.....	8
5. Kegunaan Penelitian.....	9
6. Penelitian Terdahulu.....	10
7. Metode Penelitian.....	11
8. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan umum Tentang Hukum Tata Negara.....	19
1. Penertian Hukum Tata Negara	19
2. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara.....	21
3. Asas-Asas Dalam Hukum Tata Negara.....	22
B. Konsep Otonomi daerah di Indonesia.....	27
1. Pengertian Otonomi	27
2. Macam Macam Otonomi	34
3. Asas Otonomi Daerah	36
C. Tinjauan Umum Kewenangan serta Kedudukan Otorita.....	36
1. Pengertian Kewenangan serta Kedudukan Otorita.....	37
2. Tujuan Kewenangan serta Kedudukan Otorita.....	37
D. Teori Desentralisasi.....	39
1. Pengertian Desentralisasi.....	39
2. Jenis Jenis Desentralisasi.....	40
3. Tujuan Desentralisasi.....	41
E. Tinjauan Umum tentang demokrasi.....	43
1. Pengertian Demokrasi.....	43
2. Unsur unsur Demokrasi.....	46
3. Ciri ciri Demokrasi.....	48
4. Prinsip prinsip Demokrasi.....	49
F. Teori Kedaulatan Rakyat.....	50
1. Pengertian Kedaulatan Rakyat.....	50
2. Tujuan Kedaulatan Rakyat.....	53

3. Unsur Unsur kedaulatan Rakyat.....58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....61

1. Analisis Implikasi Kewenangan dan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.....61

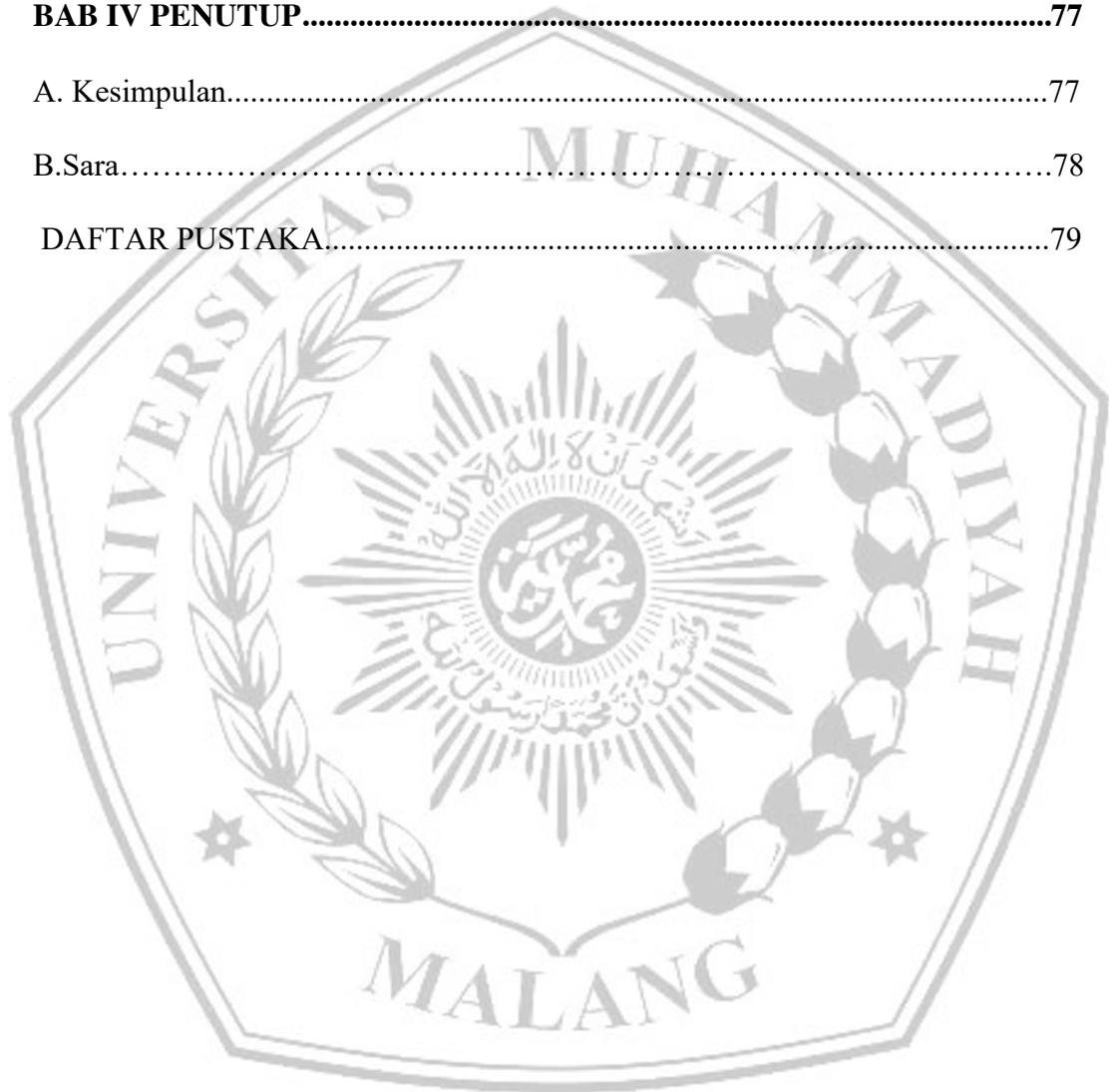
2. Analisis pasal tentang kedudukan pengangkatan kepala otorita oleh President, selaras oleh kedaulatan rakyat apa tidak.....70

BAB IV PENUTUP.....77

A. Kesimpulan.....77

B.Sara.....78

DAFTAR PUSTAKA.....79



DAFTAR TABEL

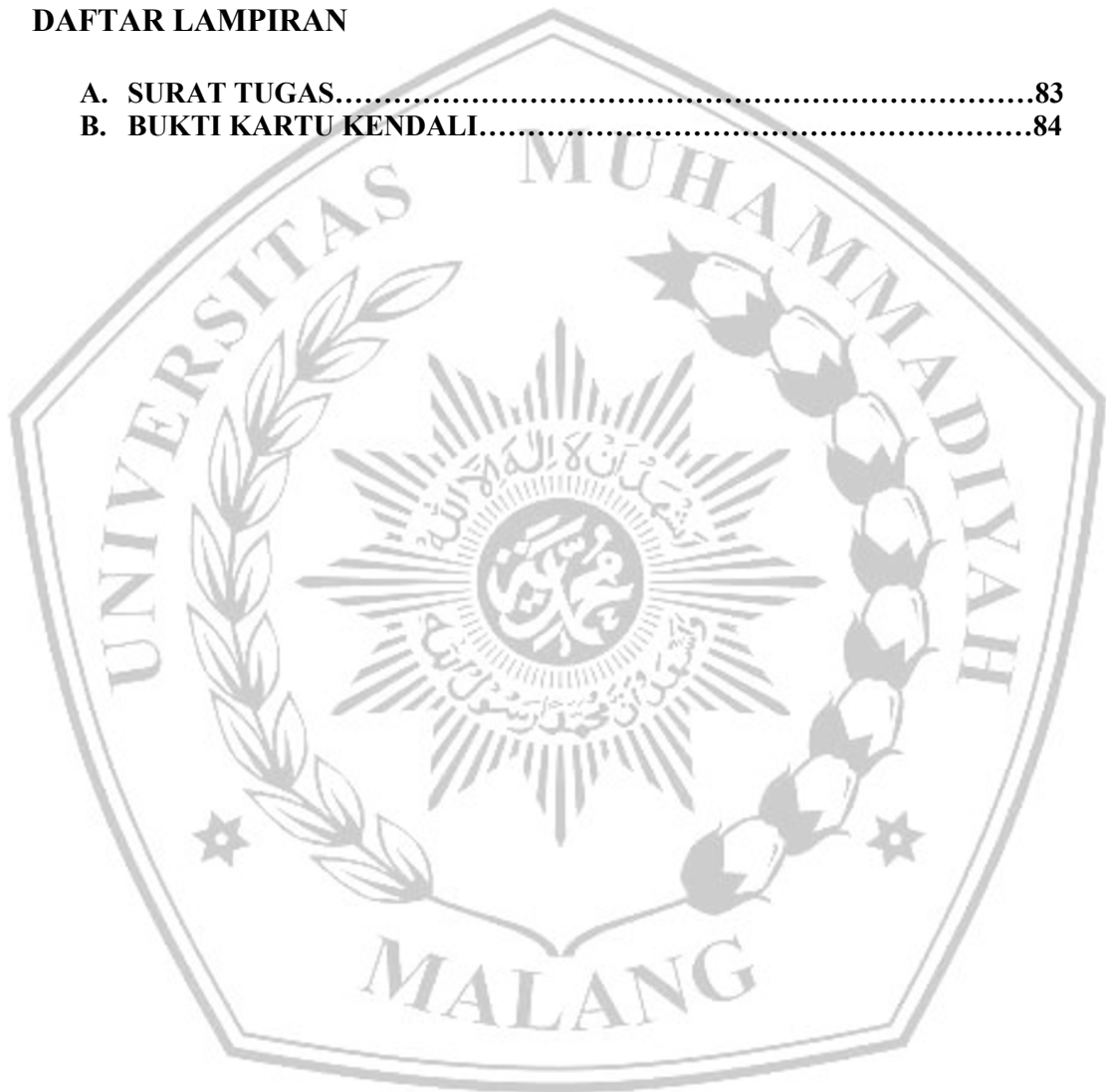
Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis Yang Berkaitan10

Tabel 2. Analisis Komparatif Model Pemerintahan Daerah Khusus di Indonesia.....68

DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT TUGAS.....83

B. BUKTI KARTU KENDALI.....84



Daftar Pustaka

Buku/E-book :

Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

SHolahudin Alfatih, SH., MH, ebook "perkembangan metode penelitian hukum di Indonesia hal 3-4"

Syafriadi, S. (2017). Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. UIR Law Review, 1(1), 25-38.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 57, 295.

Azhari, A. F. (2010). Demokrasi & Autokrasi. Pandiva Buku.

Törnquist, O., Warouw, N., Samadhi, W. P., Asgart, S. M., Subono, N. I., Nur, A., ... & Priyono, A. E. (2009). Demokrasi di Atas Pasir: Kemajuan dan Kemunduran Demokratisasi di Indonesia. Power Conflict Democracy Publication.

Tutik, T. T., & SH, M. (2016). konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Prenada Media.

Kusnardi, M. (1978). Susunan pembagian kekuasaan menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945. PT. Gramedia.

PENJELASAN HUKUM (RESTATEMENT) KEDUDUKAN PERATURAN OTORITA IBU KOTA NEGARA MENURUT HUKUM, accessed June 28, 2025,

Sunil Bastian dan Robin Luckham (Edt), "Can Democracy be Designed?, The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies", London&Newyork: Zed Books, 2003,

Astim Riyanto, "Negara Kesatuan : Konsep Asas dan Aktualisasinya" (Bandung : Yapemdo, 2006),

Sulardi. 2009. "Reformasi Hukum Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat Dalam Membangun Demokrasi". Malang. Penerbit In-TRANS Publishing

Syafriadi .(2017). "PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.

Wijaya, A. (2019). "DEMOKRASI DALAM SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Nadrilun, "mengenal lebih dekat demokrasi di Indonesia

Hendry B. Mayo, "An Introduction to Democratic Theory", (New York: Oxford university Press, 1960),

Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003),

Munir Fuady.2010."Konsep Negara Demokrasi".Jakarta. Penerbit PT Refika Aditama

SKRIPSI :

Rizky. Ariestand.i Irm,ansyah, "Hukum, Hak. Asasi Man.usia, dan Demokrasi,

Putra Aditya, " Desentralisasi Otonomi Dinegara kesatuan republik Indonesia" , (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)

Ahmad Gelora Mahardika, "Problematika Yuridis prosedural pemindahan iobu kota Negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia"

Aufa Hanum Salsabila, "Deforestasi"

Irhamudin, "pola hubungan politik dan hukum dalam kebijakan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur"

Abdul aziz, "menurut logika konsep badan otorita IKN yang berpotensi langgar UUD"

Eka sukmana "bentuk badan otorita IKN dinilai rancu"

Aufa hanum salsabila,2022"deforestasi dan migrasi penduduk ke ibu kota baru Kalimantan timur :peran sinergis pemerintah dan masyarakat"

Rahyuni Rauf , 2016, "pandangan umum terhadap konsep otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia"

JURNAL:

Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam ... - Journal UII, accessed June 28, 2025,

Sholahuddin Al-Fatih, Fitria Esfandiari, and Surya Anoraga. "Repositioning Delegated Authority and Binding Power of Ministerial Regulations in Indonesia."

Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam ... - Journal UII, accessed June 28, 2025

Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, "Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berepresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, dalam Jurnal "Jurna Ham"", Vol. 11, Nomor, 1

Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 | Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam - E-Journal UIN SUKA

Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala ... - Jurnal Konstitusi (PDF) Ibu Kota Negara Baru dan Masa Depan Republik

Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Memberikan Persetujuan untuk Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dib - UNES Law Review

Potensi Hilangnya Hak Demokrasi Masyarakat IKN Terkait Sistem Pemilihan Kepala Otorita IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 202 - Jurnal Universitas Bojonegoro

Lex Privatum Vol.XI/No.4/Apr/2023 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA - E-Journal UNSRAT

Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam ... - Journal UII

Otorita IKN in Institutional Status and Relationship on the Distribution of Power Central with the Regions Otorita IKN dalam Sta - Jurnal Konstitusi

Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

SERTIFIKAT PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Achmad Arif Alvianto

Nim : 201910110311466

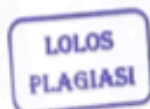
Dengan Judul Skripsi :

" TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN SERTA KEDUDUKAN
OTORITA DI IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM TATA
NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
KEDAULATAN RAKYAT"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 27 september 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum